

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Peneliti mengangkat judul penelitian dengan mengambil sebuah objek penelitian ini yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat dengan BKKBN yang berada pada wilayah Sumatera Selatan. Berikut penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

4.1. Sejarah BKKBN Sumatera Selatan

1. Periode Perintisan (1950 – 1966)

Perkumpulan dari keluarga berencana yang dimulai dari dibentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana pada 23 Desember 1957 yang bertempat di Gedung Ikatan Dokter Indonesia selanjutnya berkembang dan mengganti nama menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). Misi yang dibawa oleh PKBI untuk terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera yang dimulai dari tiga usaha yakni :

1. Mengatur kehamilan atau dengan kata lain menjarangkan kehamilan
2. Mengobati kemandulan
3. Memberi nasihat perkawinan.

Dengan terwujudnya ketiga usaha tersebut maka pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman dan dengan kelahirannya Orde Baru pada waktu itu memberikan dampak pada perkembangan yang pesat atas usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia. Dengan lahirnya Orde Baru pula maka masalah kependudukan telah menyorot perhatian pemerintah yang berhasil ditinjau dari berbagai sudut pandang.

2. Periode Pelita I (1969 – 1974)

Pada periode ini telah dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan dr. Suwardjo Suryaningrat yang resmi ditunjuk sebagai Kepala BKKBN. Dan selanjutnya, pada tahun 1972 dikeluarkannya Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan organisasi dan tata kerja BKKBN dimana salah satu isi dari Keppres ini adalah status badan organisasi resmi berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang berada langsung dibawah Presiden. Dalam pemenuhan kerja yang maksimal maka dikembangkan berbagai program pendekatan yang ditinjau serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dan program tersebut diberi nama Periode Klinik atau *Clinical Approach* yang mana ide ini merupakan langkah awal demi pendekatan kesehatan kepada masyarakat.

3. Periode Pelita II (1974-1979)

Pada Keppres No. 38 Tahun 1978 tertulis jelas bahwa kedudukan BKKBN merupakan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada langsung dibawah dan juga bertanggung jawab kepada presiden dengan tugas yakni mempersiapkan kebijakan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya yang berada di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

Pada periode ini, pendekatan serta pembinaan yang dilakukan yang awalnya fokus pada kesehatan maka ditambahkan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya yang lebih dikenal dengan Pendekatan Integratif atau *Beyond Family Planning*.

4. Periode Pelita III (1979-1984)

Periode ini memulai adanya pendekatan kemasyarakatan yang mendorong langsung peranan dan tanggung jawab masyarakat yang dilakukan melalui organisasi atau instansi masyarakat dan pemuka masyarakat yang memiliki tujuan yakni membina serta mempertahankan peserta KB yang telah terdaftar dan tentunya meningkatkan jumlah peserta yang baru. Pada periode ini, memulai strategi operasional baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan demi mempertajam segmentasi sehingga dapat menurunkan angka kelahiran yang menggunakan metode KIE dan pelayanan kontrasepsi yang termasuk bentuk *mass campaign* yang diberi nama “Safari KB Senyum Terpadu”

5. Periode Pelita IV (1983-1988)

Periode ini memiliki Kepala BKKBN baru yakni Prof.Dr.Haryono Suyono yang menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Dan memunculkan pendekatan baru yakni pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaran KB oleh pemerintah dan juga masyarakat yang lebih disikronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif. Dan juga pada periode ini, dibentuk secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 yang dilantik langsung oleh Presiden Soeharto pada acara penerimaan peserta KB Lestari yang bertempat di Taman Mini Indonesia Indah dengan diberin nama kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang memiliki tujuan yakni memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo LIBI KB.

6. Periode Pelita V (1988-1993)

Pada periode ini, para penggerak KB selalu melakukan usaha maksimal demi meningkatkan kualitas petugas dan sumber daya manusia dan pelayanan KB dengan beriiingan juga dengan dibentuknya strategi baru yakni Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi ini diluncurkan oleh LIBI yang masih sangat terbatas.

Pada periode ini ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 terkhusus pada sub sektor keluarga sejahtera dan kependudukan.

7. Periode Pelita VI (1993-1998)

Dengan adanya periode baru maka adanya strategi baru yakni Pendekatan Keluarga yang memiliki tujuan yakni menggalakan partisipasi masyarakat pada gerakan KB Nasional. Pada Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono resmi ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementrian.

8. Periode Pasca Reformasi

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian: Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.

Arah pada Kebijakan Program Pembangunan Keluarga berpacu pada upaya Prioritas Pembangunan Nasional ke-3 yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” dan ke-5 yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia” maka dengan itu Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan segera menyusun dan menyajikan laporan kinerja berdasarkan capaian yang diharapkan.

4.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai BKKBN

4.2.1 Visi

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”

4.2.2 Misi

- Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
- Menyenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
- Mengembangkan jejaringan kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

4.2.3 Nilai-Nilai BKKBN

- Cerdas adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
- Tanggung adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.

- Kerjasama adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.
- Integritas adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
- Ikhlas adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.

4.3 Kewenangan

- Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
- Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.
- Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana } Peningkatan kualitas manajemen program.
- Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
- Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
- Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

4.4.1 Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

4.4.2 Fungsi

- Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan
- Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

4.5 Lambang Instansi

Gambar 4.1

Logo BKKBN Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Arsip BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

b) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk)

Bidang ini siap dalam pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantuan evaluasi dan pada bidang ini membawahi 3 sub bidang, yakni :

- a) Sub Bidang Analisa Dampak Kependudukan
- b) Sub Bidang Penyusunan Parameter Kependudukan
- c) Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan

c) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Melaksanakan dalam penyiapan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi dengan membawahi 3 sub Bidang :

- a) Sub Bidang Bina Kesehatan KB Jalur Pemerintah dan Swasta
- b) Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
- c) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

d) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)

Pada bidang ini siap dalam melaksanakan dalam penyiapan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi dengan membawahi 3 sub Bidang :

- a) Sub Bidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia
- b) Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja
- c) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

e) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN)

ADPIN akan melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta evaluasi pada bidang Advokasi dengan membawahi 3 Sub Bidang, yakni :

- a) Sub Bidang Advokasi dan KIE
- b) Sub Bidang Data dan Informasi
- c) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan

f) Bidang Pelatihan, Pengembangan dan Penelitian (Latbang)

Latbang akan melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan membawahi 3 Sub Bidang, yakni :

- a) Sub Bidang Tata Operasional
- b) Sub Bidang Program dan Kerjasama
- c) Sub Bidang Penyelenggaran dan Evaluasi

4.7 Tugas dan Wewenang Pegawai BKKBN

4.7.1 Sekretaris dan Sub Bidang

Sekretaris memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan koordinasi pelaksanaan di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi
- b) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN Provinsi
- c) Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi pada dokumentasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi
- d) Melakukan pembinaan dan fasilitasi perangkat tata laksana dan hubungan masyarakat di provinsi
- e) Melakukan pembinaan dan fasilitasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan perwakilan
- f) Melakukan penyelenggaran pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan sarana program

Sekretaris juga dalam menjalankan sebuah tugas dan program memiliki beberapa kewenangan, yakni :

- a) Menyusun, menganalisa, mengevaluasi pada bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi
- b) Mengkoordinasi di bidang ketatausahaan, arsip dan dokumentasi
- c) Memberi bimbingan teknis dan administrator

- d) Menghimpun, pengklafisikan dan pendokumensian.
- e) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pengelolaan, perbendaharaan, akuntansi, barang milik negara dan sarana program
- f) Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam beberapa kegiatan

4.7.2 Bidang Advokasi, Pergerakan, dan Informasi

Pada bidang ADPIN memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantuan dan evaluasi pada bidang advokasi pergerakan dan informasi dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan teknis pada bidang advokasi pergerakan dan komunikasi, informasi, edukasi dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
- b) Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan norma, standarm prosedur dan kriteria pada bidang advokasi pergerakan dan komunikasi, informasi dan edukasi pada bidang pengendalian penduduk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- c) Melaksanakan pemantuan dan evaluasi pada bidang advokasi, pergerakan, dan KIE dan edukasi pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
- d) Mengumpulkan dan mengola, menganalisa dan mengevaluasi serta melaporkan data dan informasi program pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi
- e) Mengelola teknologi informasi pada situs resmi BKKBN

Selain menjalankan tugas diatas, pegawai ADPIN juga memiliki beberapa kewenangan, yaitu

- a) Mengambil keputusan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan teknis
- b) Menugaskan bawahan dalam membantu menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
- c) Menyiapkan bahan pemberian fasilitator

- d) Menerima pendelegasian tugas
- e) Melakukan layanan kepastakaan dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi

4.7.3 Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Bidang ini bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantuan dan vealuasi pada bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan rincinan tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pemberian falitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
- b) Menyusun remcana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaiapan bahan pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana
- c) Melakukan penyaiapan bahan pelaksanaan pada kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertingga;, terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan dalam melakukan peningkatan kesertaam keluarga berencana pada provinsi
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup bagi ibu, bayi dan anak dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi di tingkat provinsi

Dengan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan dalam pengumpulan data dan merencanaka kegiatan
- b) Melakasnakan sosialisasi NSPK

4.7.4 Bidang Pelatihan dan Pengembangan

Bidang Latbang memiliki tugas dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Memberikan fasilitasi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan juga bagi pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

- b) Melaksanakan pemantuan dan evaluasi pada bidang pendidikan dan pelatihan dengan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk
- c) Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi
- d) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- e) Menerima delegasi tugas

Dengan mendapatkan kewenangan sebagai berikut :

- a) Merumuskan kebutuhan pada penelitian, pengembangan.
- b) Menyiapkan instrumen pembina teknis dan fasilitas kegiatan
- c) Adanya kunjungan kerja

4.7.5 Bidang Pengendalian Penduduk

Bertanggungjawab dalam melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pada bidang pengendalian penduduk dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Memfasilitasi dalam melaksanakan kebijakan teknis pada bidang pengendalian penduduk
- b) Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan
- c) Melakukan pemantuan dan evaluasi
- d) Menjadi fasilitator program KB dan KS untuk Kabupaten dan Kota

Dengan beberapa kewenangan yang didapat, yakni :

- a) Menyusun, menganalisa dan mengevaluasi sebuah konsep
- b) Melaksanakan sosialisasi dan kajian
- c) Melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja terkait

4.7.6 Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga

KSPK bertanggungjawab dalam melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dalam bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Memberikan fasilitasi dan melaksanakan kebijakan teknis pada bidang KSPK
- b) Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi
- c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
- d) Menjadi tim fasilitasi Bimbingan Teknik ke Kabupaten dan Kota
- e) Memperluas jejaring kerja kemitraan dengan instansi atau lembaga lain
- f) Menerima pendelegasian tugas

Dengan kewenangan sebagai berikut :

- a) Menyosialisasikan NSPK
- b) Melaksanakan pengadlian sarana penyelenggaraan program

5.1 Profil Informan

a) Informan Utama 1

Nama : Nopian Andusti, SE., MT
Posisi : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Deskripsi Pekerjaan : Melakukan program kerja yang didapat dari pusat dan melakukan kontrol serta evaluasi terhadap program kerja

b) Informan Utama 2

Nama : Desliana, SE, MM
Posisi : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Keluarga

Deskripsi Pekerjaan : Melakukan program-program pada pengembangan keluarga dan remaja yang ada di SumSe

- c) Informan Utama 3
 Nama : Dwi Septianism S.Km
 Posisi : Pembina Duta GenRe
 Deskripsi Pekerjaan : Melakukan perencanaan, eksekusi dan evaluasi program kerja pada remaja yangdijalankan oleh Duta GenRe
- d) Informan Pendukung 1
 Nama : Verrel Amartya
 Pekerjaan/Posisi : Duta GenRe 2018
 Deskripsi Posisi : Merupakan penyuluh pada setiap sosialisasi dan merupakan pelaksana kegiatan
- e) Informan Pendukung 2
 Nama : Anisa Nursani
 Pekerjaan/Posisi : Duta GenRe 2018
 Deskripsi Posisi : Merupakan penyuluh pada setiap sosialisasi dan merupakan pelaksana kegiatan
- f) Informan Pendukung 3
 Nama : Farhansyah Pratama
 Pekerjaan/Posisi : Duta GenRe 2020
 Deskripsi Posisi : Merupakan penyuluh pada setiap sosialisasi dan merupakan pelaksana kegiatan
- g) Informan Pendukung 4
 Nama : Febi Marensia
 Pekerjaan/Posisi : Duta GenRe 2020
 Deskripsi Posisi : Merupakan penyuluh pada setiap sosialisasi dan merupakan pelaksana kegiatan
- h) Informan Pendukung 5
 Nama : Yuniar Putri Utami
 Pekerjaan/Posisi : Mahasiswa
 Deskripsi Posisi : Merupakan peserta dari kegiatan Duta GenRe dari 2 tahun silam